

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
 KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	JENIS BELANJA	WEWENANG PENANDATANGANAN	RENCANA BELANJA (Rp)
1	2	3	4
A.	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA		15.919.572.000
A.1	Belanja Hibah kepada Bidang Keagamaan:		1.275.000.000
A.1.1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kepala Dinas Sosial	125.000.000
A.1.2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Kepala Dinas Sosial	100.000.000
A.1.3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	Kepala Dinas Sosial	100.000.000
A.1.4	Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000
A.1.5	Belanja Hibah Sertifikasi Tanah Wakaf	Kepala Dinas Sosial	100.000.000
A.1.6	Belanja Hibah Transportasi Pemberangkatan Haji	Kepala Dinas Sosial	200.000.000
A.1.7	Belanja Hibah Pengiriman Kafilah MTQ	Kepala Dinas Sosial	250.000.000
A.1.8	Belanja Hibah kepada Masjid Agung Kepanjen	Kepala Dinas Sosial	250.000.000
A.2	Belanja Hibah kepada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:		9.450.000.000
A.2.1	Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Cabang Olah Raga	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.800.000.000

1	2	3	4
A.2.2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	150.000.000
A.2.3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan/KNPI	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	500.000.000
A.3	Belanja Hibah kepada Bidang Keprofesian:		500.000.000
A.3.1	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	500.000.000
A.4	Belanja Hibah kepada Bidang Kesehatan:		1.900.000.000
A.4.1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Kepala Dinas Kesehatan	1.000.000.000
A.4.2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Kepala Dinas Kesehatan	350.000.000
A.4.3	Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Kepala Dinas Sosial	500.000.000
A.4.4	Belanja Hibah kepada Yayasan Jantung Sehat	Kepala Dinas Kesehatan	50.000.000
A.5	Belanja Hibah kepada Bidang Peranan Wanita:		1.750.140.000
A.5.1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000
A.5.2	Belanja Hibah kepada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.000
A.5.3	Belanja Hibah kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.140.000

1	2	3	4
A.6	Belanja Hibah kepada Bidang Sarana Prasarana		1.044.432.000
A.6.1	Belanja Hibah Biaya Nilai Tegakan kepada Perum. Perhutani	Dinas Kehutanan	58.000.000
A.6.2	Belanja Hibah Biaya Investasi JLS kepada Perum. Perhutani	Dinas Kehutanan	933.000.000
A.6.3	Belanja Hibah Biaya Investasi JLS Kepada Perum Perhutani (Bantuan Provinsi)	Dinas Kehutanan	53.432.000
B.	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN		13.310.850.000
B.1	Belanja Hibah Pendampingan Program kepada Kelompok Masyarakat:		13.310.850.000
B.1.1	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perdesaan	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	5.680.000.000
B.1.2	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perkotaan	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	3.145.000.000
B.1.3	Belanja Hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	606.000.000
B.1.4	Belanja Hibah Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000
B.1.5	Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) kepada Kelompok Masyarakat (Bantuan Provinsi)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	150.000.000
B.1.6	Belanja Hibah Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	41.400.000
B.1.7	Belanja Hibah kepada Koperasi untuk Anggota Peternak Sapi Perah	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	465.000.000
B.1.8	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PPUED)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000

1	2	3	4
B.1.9	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000
B.1.10	Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan (PDM-BKP)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000
B.1.11	Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000
B.1.12	Belanja Hibah DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1.089.500.000
B.1.13	Belanja Hibah Pendamping DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	108.950.000
B.1.14	Belanja Hibah Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Kepala Kantor Perumahan	20.000.000
B.1.15	Belanja Hibah untuk Modal Kerja Koperasi / Kelompok Korban PHK industri rokok dan masyarakat, di lingkungan industri hasil tembakau dan penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.750.000.000
C.	BELANJA HIBAH BIDANG PENDIDIKAN		29.769.830.000
C.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan:		29.769.830.000
C.1.1	Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 Tahun	Kepala Dinas Pendidikan	4.104.360.000

1	2	3	4
C.1.2	Belanja Hibah Dana BOS SD/SDLB Swasta	Kepala Dinas Pendidikan	4.283.630.000
C.1.3	Belanja Hibah Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta	Kepala Dinas Pendidikan	21.381.840.000
D.	BELANJA HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL		2.000.000.000
D.1	Belanja Hibah untuk Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset/Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Fungsional dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	2.000.000.000

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA